

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Rendahnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Jasa
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi D.I Yogyakarta 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DI Yogyakarta selama periode 2006-2013 menunjukkan kinerja yang kurang baik. Hal ini terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tumbuh pada laju rata-rata 4,78 persen per tahun (Gambar 1). Laju ini lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,9 persen per tahun pada periode yang sama. Di tingkat wilayah, Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan output PDRB terendah dengan sumbangan sebesar 1,44 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Jawa Bali. Kontribusi DI Yogyakarta terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 0,85 persen pada tahun 2013.

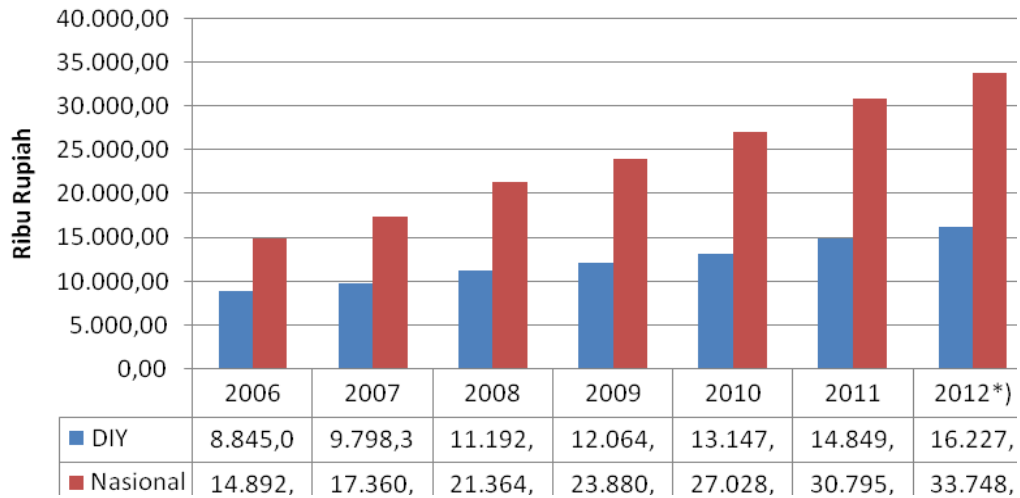


Sumber: BPS, 2013

Laju pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita DI Yogyakarta dari angka rata-rata nasional. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita DI Yogyakarta dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 59,39 persen, maka pada tahun 2013 rasionya mengecil menjadi 48,08 persen (Gambar 2). Di tingkat wilayah Jawa, PDRB perkapita DI Yogyakarta berada pada posisi terendah. Dengan kenyataan bahwa pertumbuhan penduduk antar provinsi tidak terlalu berbeda

jauh, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja rata-rata provinsi lain berkembang lebih pesat dari DI Yogyakarta.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

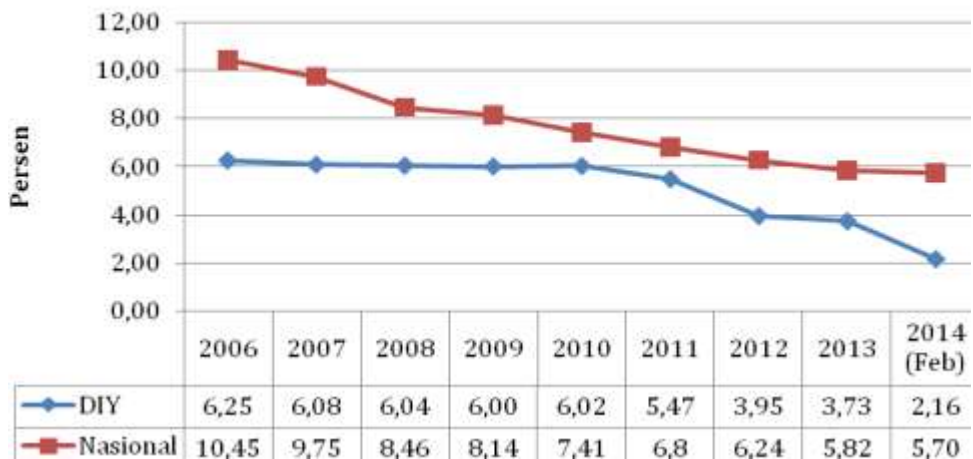


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional, TPT DI Yogyakarta relatif lebih rendah. Tingkat pengangguran terbuka DI Yogyakarta selama 2006-2013 berkurang sebesar 2,52 persen (Gambar 3). Rendahnya tingkat pengangguran di tengah pendapatan per kapita yang rendah ini mengindikasikan perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah, serta rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah. Diperlukan penelusuran lebih lanjut tentang kualitas pekerjaan yang tersedia di daerah.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

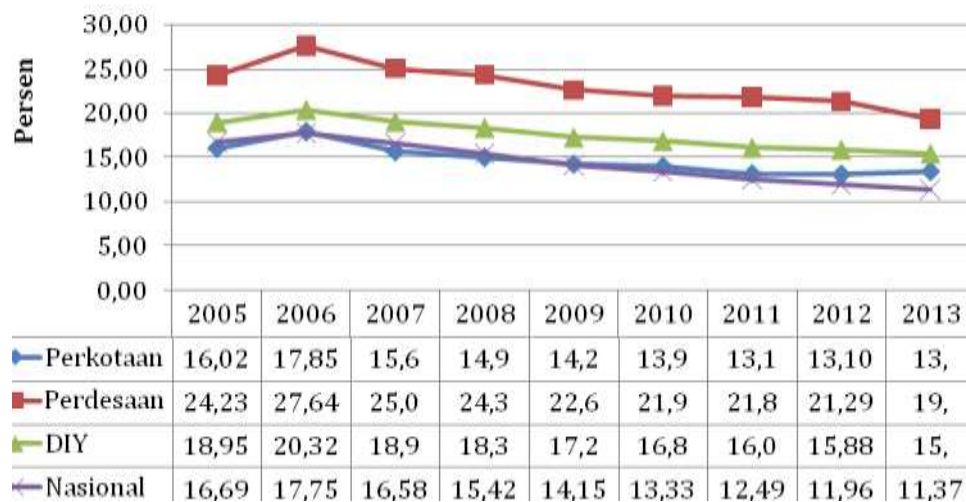


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak positif bagi penurunan kemiskinan wilayah. Persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta cenderung menurun selama periode 2006-2013, khususnya di perkotaan (Gambar 4). Namun demikian secara nasional tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta masih tergolong cukup tinggi. Jika pada tahun 2013 persentase penduduk miskin nasional sudah mencapai 11,37 persen, maka tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta masih mencapai 15,4 persen. Tantangan yang harus dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dengan laju penurunan yang relatif lambat. Hal ini menegaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di perdesaan.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

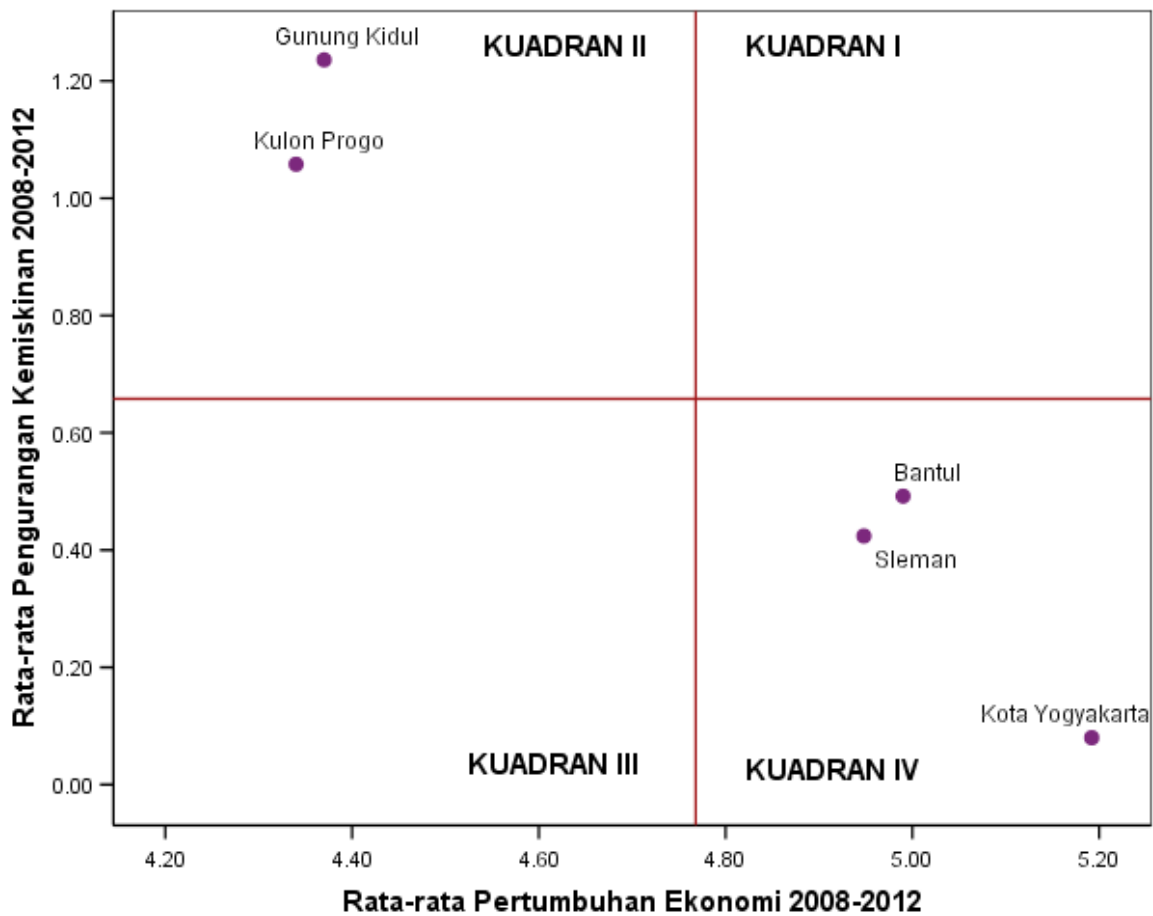
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Di Yogyakarta menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, tidak ada kabupaten dan kota yang merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi DI Yogyakarta belum dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*).

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012(diolah)

Kedua, Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti industri manufaktur, pertanian, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, tidak ada kabupaten dan kota yang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*).

Keempat, Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan

koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

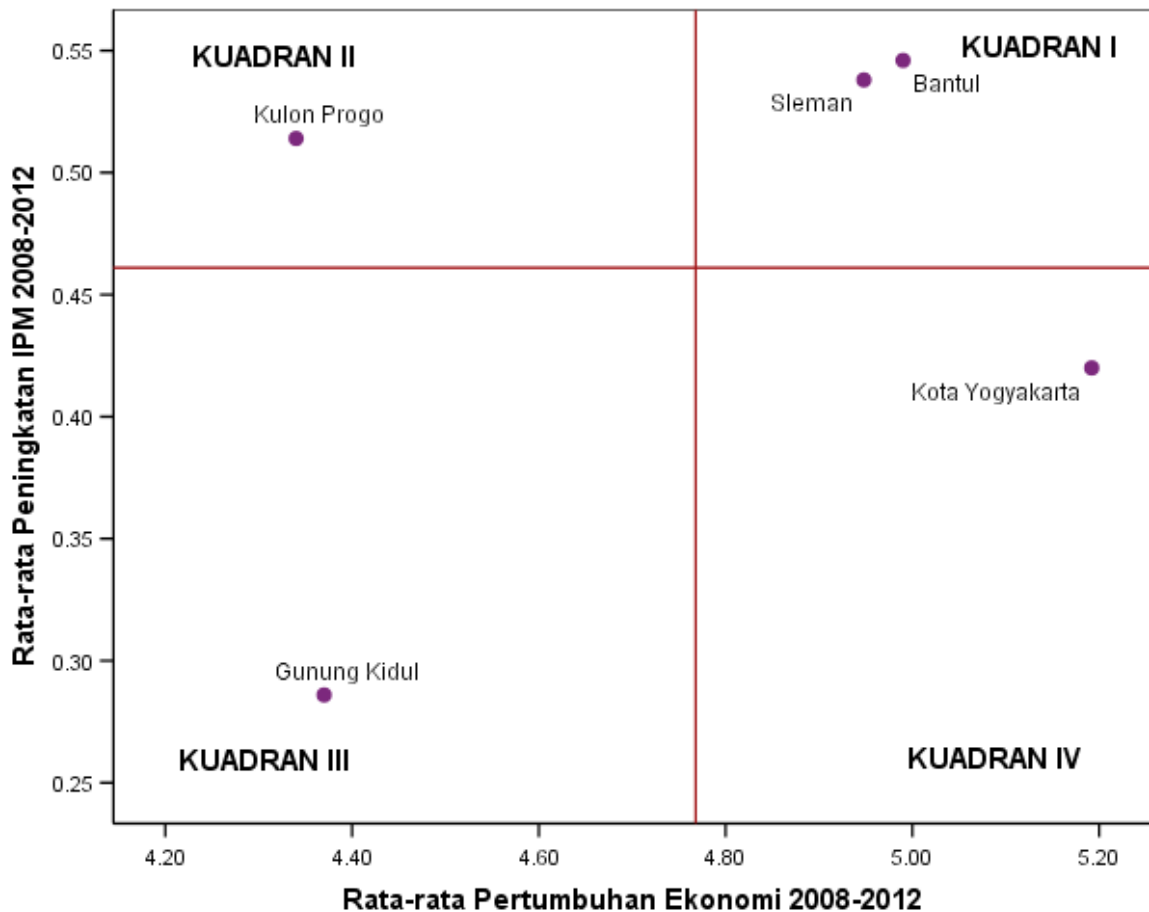
Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi DI Yogyakarta berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Sleman dan Bantul yang terletak pada Kuadran I dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Kulon Progo yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi seperti Industri manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Gunung Kidul terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kota Yogyakarta terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

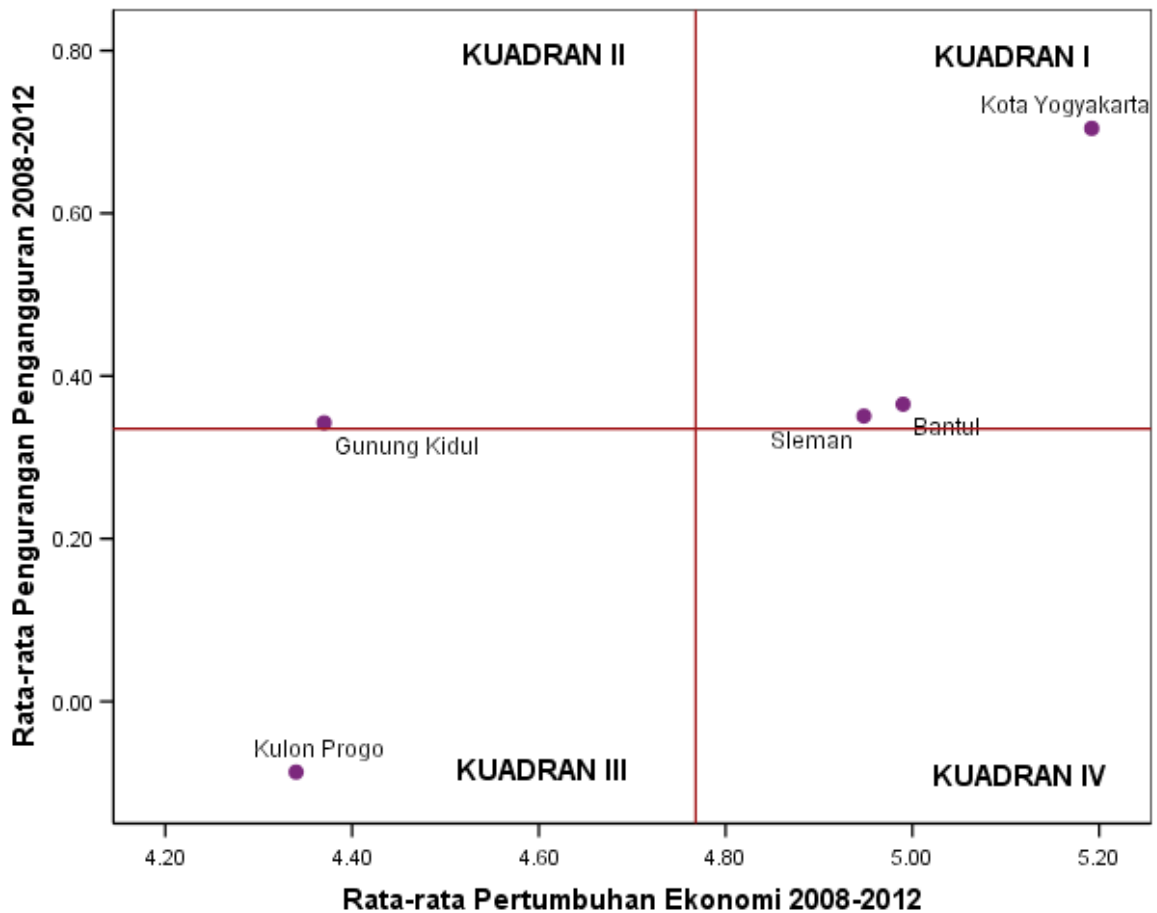
Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri manufaktur, pertanian, perdagangan dan jasa.

Kedua, Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah.

Ketiga, Kabupaten Kulon Progo terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low*

growth, less pro-job). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



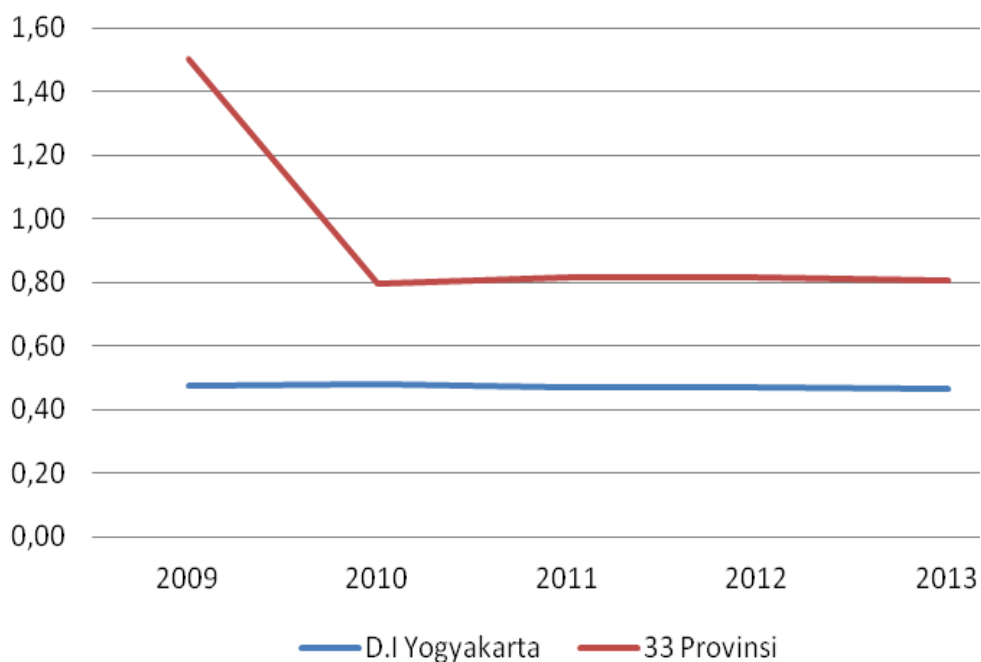
Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Keempat, tidak ada kabupaten dan kota terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti industri pengolahan, pertanian perdagangan, jasa. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2007-2012 merupakan kesenjangan sedang. Kesenjangan ekonomi di Provinsi DI Yogyakarta masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat (Gambar 8). Penyebab kesenjangan ekonomi di Provinsi DI Yogyakarta adanya perbedaan distribusi sumber daya di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur umumnya lebih diutamakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)
Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Kota Yogyakarta memiliki PDRB tertinggi diantara kabupaten di DIY karena kota ini merupakan pusat kegiatan perekonomian di DI Yogyakarta, yang didukung oleh latar belakang Kesultanan Yogyakarta. Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan infrastruktur yang memadai akan menjadi pusat kegiatan perekonomian

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
Kulon Progo	6.955	7.872	8.481	9.096	9.859	10.671
Bantul	7.343	8.372	9.060	9.972	10.983	12.115
Gunung Kidul	7.214	8.146	8.865	9.772	10.644	11.629
Sleman	9.635	10.852	11.633	12.324	13.693	14.977
Kota Yogyakarta	21.947	25.095	27.220	30.361	33.069	36.363
DIY	9.798	11.193	12.064	13.148	14.850	16.227

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Rendahnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor jasa memegang peran terbesar dalam perekonomian Provinsi DI Yogyakarta dengan pangsa masing-masing sebesar 20 persen (Tabel 2). Peran sektor pertanian sebagai pendorong utama pertumbuhan daerah semakin berkurang. Sumber pertumbuhan terbesar di DI Yogyakarta adalah perdagangan, hotel, dan restoran, diikuti oleh sektor jasa. Pertumbuhan sektor-sektor keuangan, listrik, gas dan air bersih, serta pengangkutan dan komunikasi cukup pesat dan peranannya semakin penting sebagai pendorong pertumbuhan daerah.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	14,23	16,07
2.	Pertambangan	0,70	0,71
3.	Industri Pengolahan	14,36	13,48
4.	Listrik, Gas, Air Minum	1,31	0,91
5.	Konstruksi	10,78	9,89
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	19,79	20,84
7.	Angkutan, Telekomunikasi	8,83	10,98
8.	Keuangan	9,96	9,87
9.	Jasa-jasa	20,05	17,25
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Apabila ditelusuri lebih lanjut, sektor basis sektor utama (basis) Provinsi DI Yogyakarta yang memiliki LQ lebih besar dari satu adalah sektor jasa-jasa, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, pertanian, keuangan, serta perdagangan, hotel dan restoran (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa *share* subsektor tersebut untuk Provinsi DI Yogyakarta secara proporsional lebih tinggi dari nasional. Dengan kata lain, Provinsi DI Yogyakarta memiliki keunggulan komparatif pada sektor-sektor tersebut dibanding daerah-daerah lain. Kecenderungan menarik adalah semakin menguatnya nilai LQ pada

sektor jasa yang mengindikasikan adanya peluang dan potensi Provinsi DI Yogyakarta untuk mengembangkan industri jasa dan pariwisata.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,34	1,34	1,31	1,26	1,27
a. Tanaman Bahan Makanan	2,04	2,02	2,00	1,92	1,96
b. Tanaman Perkebunan	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21
c. Peternakan	1,48	1,46	1,42	1,44	1,44
d. Kehutanan	1,24	1,22	1,21	1,22	1,24
e. Perikanan	0,21	0,21	0,21	0,20	0,21
2. Pertambangan dan Penggalian	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	0,76	0,71	0,68	0,72	0,69
3. Industri Pengolahan	0,50	0,50	0,51	0,52	0,49
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,54	0,54	0,56	0,57	0,52
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,27	1,18	1,18	1,18	1,21
a. Listrik	1,80	1,79	1,79	1,75	1,73
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,68	0,65	0,63	0,61	0,69
5. Konstruksi	1,52	1,49	1,50	1,53	1,52
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,18	1,23	1,20	1,17	1,17
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,61	0,64	0,63	0,60	0,59
b. Hotel	2,60	2,60	2,55	2,63	2,80
c. Restoran	4,34	4,25	4,40	4,48	4,58
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,31	1,20	1,14	1,12	1,09
a. Pengangkutan	1,96	1,93	1,88	1,86	1,85
1). Angkutan Rel	6,01	6,03	6,08	4,74	5,58
2). Angkutan Jalan Raya	3,59	3,50	3,45	3,40	3,27
3). Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5). Angkutan Udara	1,54	1,57	1,41	1,46	1,60
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,33	0,35	0,35	0,36	0,37
b. Komunikasi	0,78	0,69	0,66	0,67	0,65
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,98	0,99	1,01	1,03	1,07
a. Bank	0,41	0,42	0,45	0,49	0,54
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	1,19	1,21	1,24	1,34	1,33
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,47	0,46	0,44	0,48	0,45

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
d. Real Estat	2,16	2,18	2,18	2,19	2,26
e. Jasa Perusahaan	0,23	0,22	0,23	0,23	0,24
9. Jasa-jasa	1,81	1,78	1,81	1,83	1,88
a. Pemerintahan Umum	2,87	2,86	2,95	3,01	3,21
b. Swasta	0,99	0,96	0,96	0,97	0,96
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	1,77	1,72	1,72	1,73	1,70
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	1,04	1,01	1,01	1,03	1,05
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,69	0,67	0,67	0,68	0,68

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Perekonomian DI Yogyakarta telah mengalami transformasi dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan jasa. Namun transformasi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan nilai tambah produk industri dan jasa sehingga PDRB/kapita DI Yogyakarta masih relatif rendah.

Sejalan dengan kontributor terbesar dalam pembentukan nilai PDRB Wilayah, sektor-sektor yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan, keuangan, dan jasa-jasa. Selama periode 2010-2014, sektor jasa dan perdagangan mampu menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan sektor-sektor lainnya (Tabel 4). Pertumbuhan sektor industri pengolahan memiliki arti yang sangat strategis bagi perekonomian daerah dalam dua hal. Pertama, permintaan terhadap produk manufaktur relatif lebih elastis terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dibanding permintaan terhadap komoditas pertanian primer. Kecenderungan meningkatnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya proporsi kelas menengah diperkirakan akan disertai dengan meningkatnya permintaan barang-barang konsumsi yang dihasilkan dari sektor industri. Kedua, sektor industri pengolahan memiliki kelebihan dibanding sektor-sektor lain dalam penciptaan nilai tambah, dan dampak berganda bagi pengembangan sektor-sektor lain melalui kaitan ke depan (sektor pengguna) dan ke belakang (sektor penyedia input), serta penciptaan lapangan kerja.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	625.832	505.660	-120.172
2	Pertambangan	17.237	4.002	-13.235
3	Industri Pengolahan	292.624	296.485	3.861
4	Listrik, Gas, Air	242	1.750	1.508
5	Bangunan	91.864	96.255	4.391
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	445.443	529.841	84.398
7	Angkutan & Telekomunikasi	86.417	75.244	-11.173
8	Keuangan	4.238	67.048	62.810
9	Jasa-Jasa	338.547	412.627	74.080
	Total	1.902.444	1.988.912	86.468

Sumber : BPS, 2013

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Jika PDRB dianalisis dari sisi penggunaan, peranan impor dan konsumsi rumah tangga sangat besar dengan pangsa masing-masing lebih dari 50 persen (Tabel 5). Sementara itu, pangsa investasi (Pembentukan Modal tetap Bruto) yang sangat penting bagi pertumbuhan daerah relatif tinggi, yaitu sekitar 31,2 persen. Peranan impor dapat bernilai positif jika lebih banyak digunakan untuk investasi. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Pada tahun 2013, konsumsi pemerintah, rumah tangga, dan impor masih tetap merupakan sumber utama pertumbuhan daerah.

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di DI Yogyakarta secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

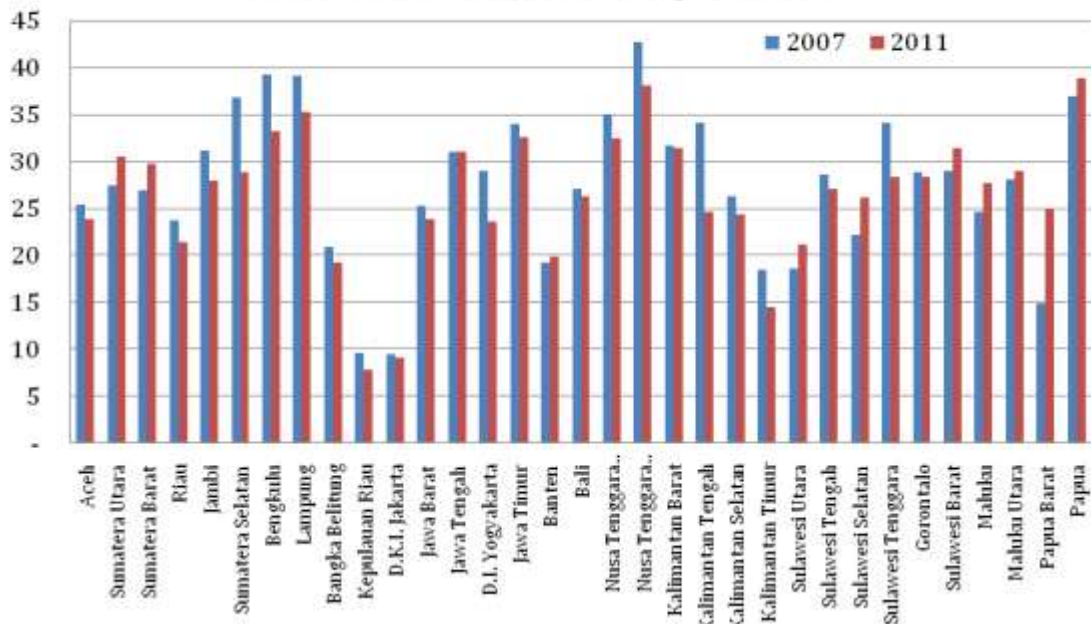
No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	52,18	47,67
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	3,56	3,05
3.	Konsumsi Pemerintah	26,34	19,66
4.	PMTB	31,20	25,61
5.	Perubahan Stok	1,56	2,71
6.	Ekspor	42,17	43,68
7.	Impor	57,00	42,39
	Total	100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Fakta tingginya persentase kemiskinan daerah yang diiringi dengan tingkat pengangguran yang tinggi tampaknya berkaitan erat dengan rendahnya kualitas pekerjaan yang tersedia di daerah. Hal ini bisa ditelusuri dari besarnya jumlah pekerja bebas di sektor pertanian, pekerja bebas di sektor non-pertanian, dan pekerja tidak dibayar. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

Perkembangan tingkat pekerja yang kurang berkualitas di DI Yogyakarta persentasenya menurun dari tahun 2007 ke 2011, dan termasuk rendah secara nasional. Pada tahun 2011 persentase pekerjaan kurang berkualitas di DI Yogyakarta mencapai sekitar 23,61 persen, menurun jika dibandingkan pada tahun 2007 yang mencapai 28,99 persen. Dibandingkan wilayah lainnya di Jawa, jumlah pengangguran kurang berkualitas di DI Yogyakarta menempati posisi ketiga terendah setelah DKI Jakarta dan Banten.

4. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan prasarana perhubungan yang baik khususnya memperlancar lalu lintas penduduk dan distribusi barang. Salah satu prasarana utama adalah jalan. Secara keseluruhan wilayah DI Yogyakarta dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 4.592 km. Jika dilihat dari sisi kuantitas sebenarnya ketersediaan jaringan jalan di Yogyakarta cukup baik. Hal ini terlihat dari indikator kerapatan jalan, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen (Tabel 6). Angka kerapatan jalan (*road density*) di wilayah ini lebih jauh tinggi dari angka nasional dan berada di peringkat 2 nasional.

Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

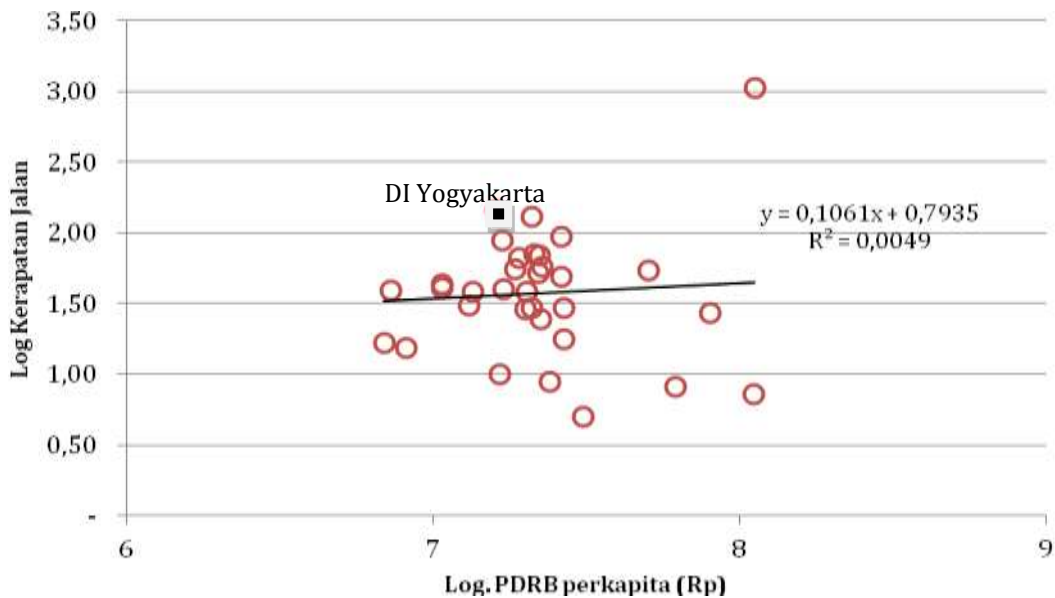
No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DI Yogyakarta	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dapat dianalisis dengan membandingkan tingkat pendapatan perkapita dan kerapatan jalan antarprovinsi di Indonesia. Hal ini didasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian. Dengan menggunakan data seluruh provinsi di Indonesia terlihat hubungan positif antara PDB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 11). Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu perekonomian, maka kerapatan jalannya cenderung semakin tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi DI Yogyakarta relatif lebih baik dibandingkan

perekonomian dengan tingkat pendapatan per kapita yang sama. Dengan demikian panjang jalan bukanlah masalah utama bagi DI Yogyakarta.

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, terlihat bahwa lebih dari 80 persen panjang jalan di DI Yogyakarta memiliki permukaan beraspal (Tabel 7). Namun hanya 39 persen jalan negara dalam kondisi baik, sisanya dalam kondisi sedang dan rusak. Demikian pula kondisi jalan provinsi dan kabupaten, masing-masing hanya 51 persen dan 36 persen dalam kondisi baik. Tingginya tingkat kerusakan jalan ini tentu menjadi penghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengembangan industri lokal dan jasa.

Tabel 7
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

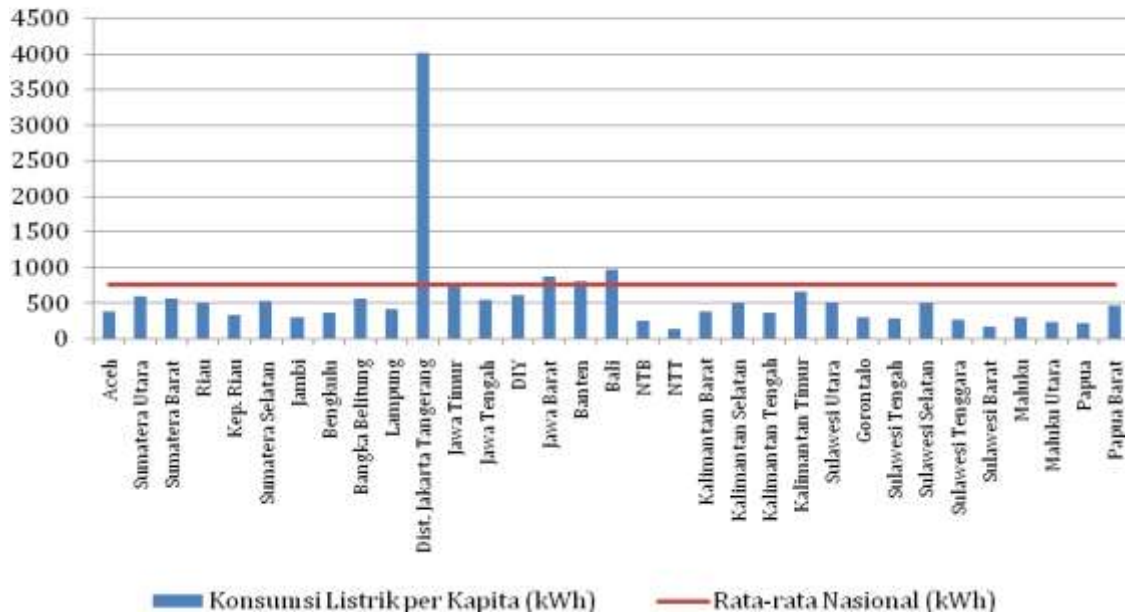
PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
DI Yogyakarta	562	81	74	11	51	8	3	0	690	100
Jawa Bali	11.081	73	896	6	625	4	2.688	17	15.270	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Di Yogyakarta termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi

terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita.

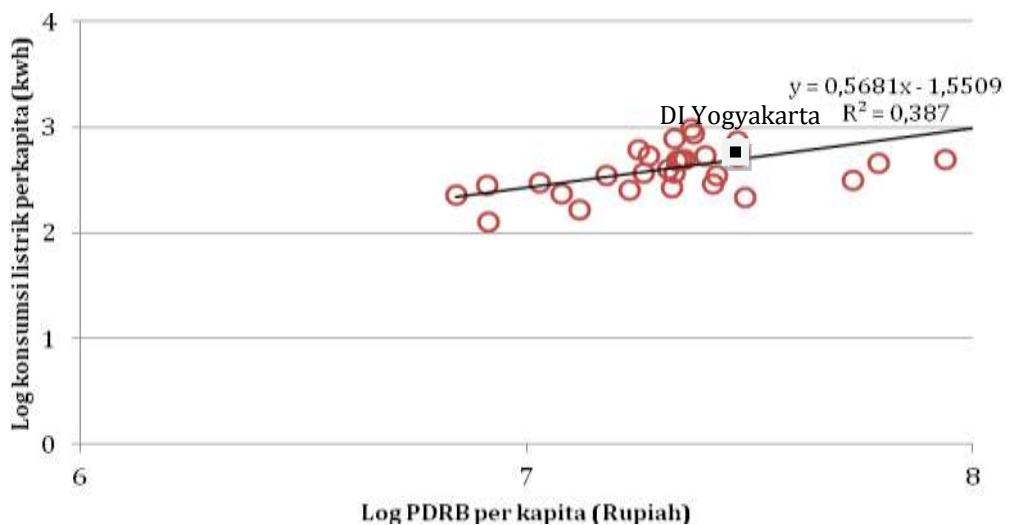
Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Provinsi yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Posisi DI Yogyakarta berada di atas kurva linier, menunjukkan provinsi ini tidak mengalami defisiensi infrastruktur listrik pada tahun 2013.

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



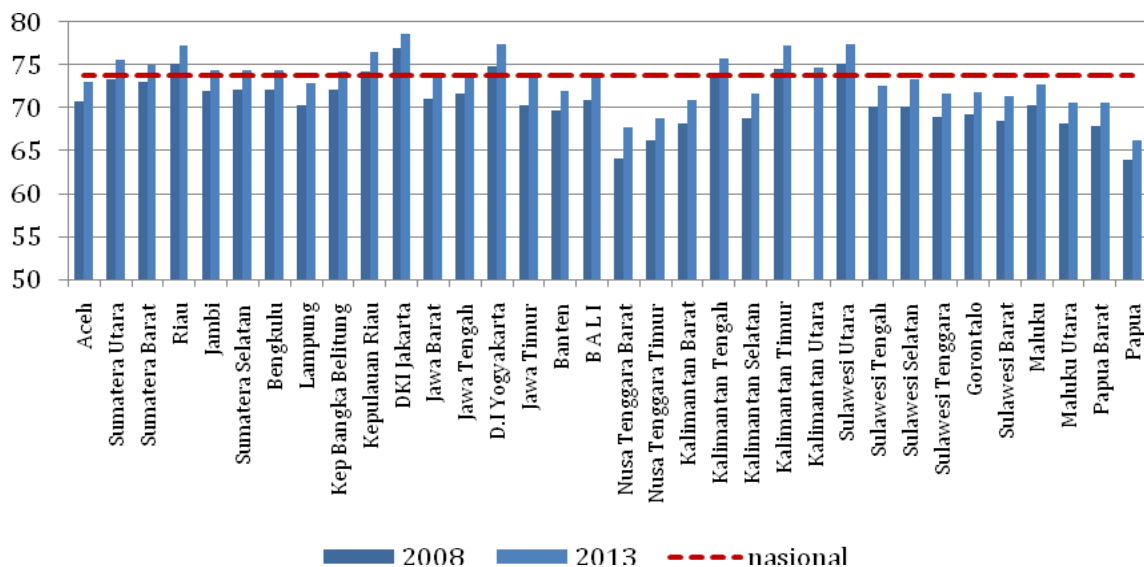
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mungkin menghambat pertumbuhan DI Yogyakarta adalah kualitas sumber daya manusianya yang relatif rendah.

Indeks Pembangunan Manusia DI Yogyakarta pada tahun 2013 berada pada peringkat kedua dari 33 provinsi, dan berada diatas rata-rata nasional (Gambar 13). Keteringgalan DI Yogyakarta terutama adalah pada indikator angka melek huruf. Pada indikator angka melek huruf, capaian di DI Yogyakarta pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 89,46 menjadi 92,86 persen, lebih rendah dari angka nasional sebesar 94,14. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari angka 73,11 tahun pada tahun 2008 menjadi 73,62 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di DI Yogyakarta meningkat dari 8,71 tahun pada 2008 menjadi 9,33 tahun pada 2013.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Perbaikan kualitas sumber daya manusia di DI Yogyakarta tercermin dari komposisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 40,24 persen pada tahun 2008 menjadi 52,87 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis perdagangan dan jasa.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	785.064	601.552	(183.512)
2	SMTp	409.859	356.653	(53.206)
3	SMTA Umum	577.871	737.945	160.074
5	Diploma I/II/III/Akademi	95.459	85.893	(9.566)
6	Universitas	131.481	250.853	119.372
Total		1.999.734	2.032.896	33.162

Sumber: BPS, 2014

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat yang dihimpun bank umum dan BPR di Provinsi DI Yogyakarta lebih tinggi dibanding pinjaman yang dikucurkan. Kondisi ini mengindikasikan banyaknya dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi bagi kegiatan produktif melalui fungsi intermediasi perbankan. Rasio antara pinjaman dan simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR pada tahun 2013 sebesar 0,68 (Tabel 9). Rasio tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,92. Hal ini berarti bahwa kegiatan investasi di Provinsi DI Yogyakarta ditentukan oleh simpanan masyarakat.

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
DI Yogyakarta	36.592	25.056	0,68	0,54
Jawa Bali	2.785.534	2.357.461	0,84	0,42
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

Sumber: BPS, 2013

Rasio investasi (PMTB) terhadap simpanan masyarakat di DI Yogyakarta masih kurang dari satu (0,54), artinya potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di DI Yogyakarta adalah bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan. Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif.

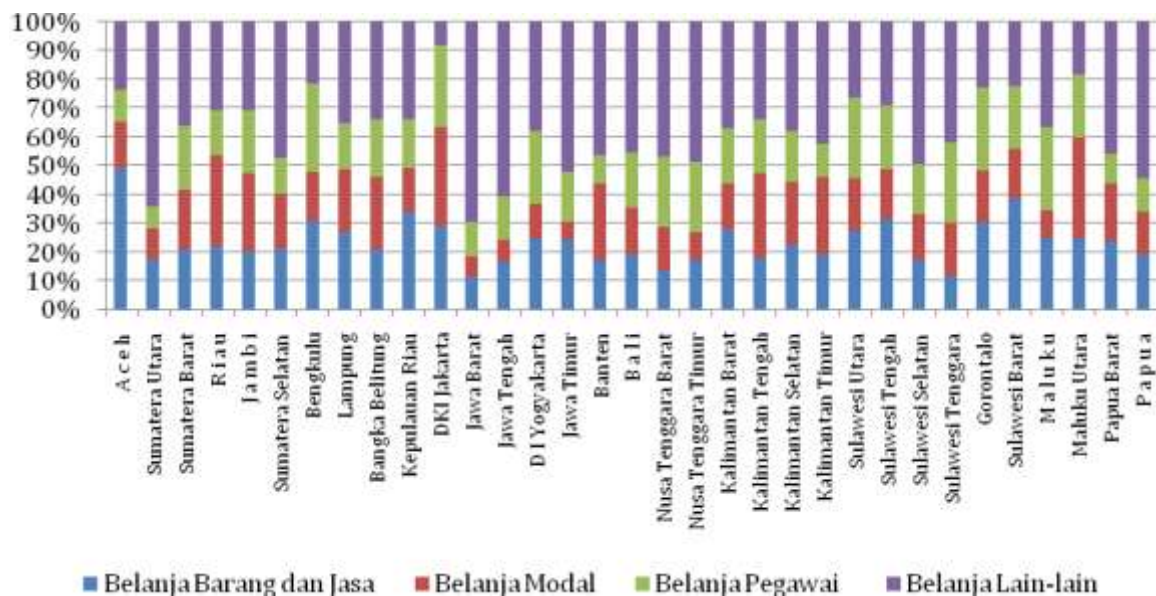
7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting

di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Terkait dengan hal ini komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik masih rendah. Hal ini terlihat dari relatif rendahnya rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja (pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di DI Yogyakarta). Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dan belanja pegawai dalam total belanja APBD di DI Yogyakarta masing-masing sebesar 11,91 persen dan 25,60 persen (Gambar 14). Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Prospek pertumbuhan daerah cukup baik bila dilihat dari beberapa modal pembangunan yang dimiliki, di antaranya prospek integrasi ekonomi daerah ke dalam pengembangan ekonomi Jawa. Percepatan pengembangan ekonomi Jawa diperkirakan

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Manfaat dari proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya. Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan provinsi DI Yogyakarta Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi DI Yogyakarta dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,3 – 6,5 persen dapat tercapai. Terealisasinya dana keistimewaan untuk mendukung pembangunan di Provinsi DI Yogyakarta akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Kinerja sektor pertanian di Yogyakarta juga mengalami perbaikan sehingga meningkatkan perekonomian daerah.
2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta terus dilakukan agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 13,8 – 9,9 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 15,94 persen. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi DI Yogyakarta harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 6,04 poin persentase atau 1,01 poin persentase per tahun
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi DI Yogyakarta akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah DI Yogyakarta maupun lingkungan eksternal. Perlambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah sektor tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian;
- b. Peningkatan investasi di daerah;
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha;
- f. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah.

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh

dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- c. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
- d. Pemerataan akses pendidikan terutama pendidikan menengah, dan kesehatan;
- e. Peningkatan kualitas belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.
- g. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah

